

ANALISIS YURIDIS PERAN SERIKAT BURUH TERHADAP PENENTUAN STANDAR KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

INTISARI

Umar Azmar Mahmud Farig¹ dan Ari Hernawan²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran serikat buruh dalam penentuan standar kebutuhan hidup layak dan relevansi komponen kebijakan standar kebutuhan hidup layak terhadap pemenuhan kesejahteraan buruh.

Metode yang digunakan pada penelitian yang bersifat yuridis normatif ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga dalam penyusunannya tidak memerlukan populasi ataupun sampel. Data yang digunakan ialah data sekunder, untuk memperoleh data sekunder berupa berbagai bahan hukum ialah dengan cara studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penyajian penelitian dilakukan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran serikat buruh terhadap penentuan standar kebutuhan hidup layak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh cenderung berpengaruh, hal ini berupa tanggung jawab tidak hanya sebagai representase kolektif buruh melainkan juga sebagai sarana mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Terdapat relevansi dalam komponen kebijakan standar kebutuhan hidup layak terkait upaya pemenuhan kesejahteraan buruh, hal ini dibuktikan dengan disertakannya harga item komponen kebutuhan hidup layak sebagai salah satu instrumen pemenuhan kesejahteraan buruh.

Kata Kunci: Serikat buruh, Kebutuhan hidup layak, Kesejahteraan

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (umar.amf@gmail.com)

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (ari.hernawan@rocketmail.com)



JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF LABOUR UNION IN THE DETERMINATION OF THE DECENT LIVING NEEDS STANDART

ABSTRACT

Umar Azmar Mahmud Farig and Ari Hernawan

This research was aimed to knowing and assessing how the role of labour union in the determination of the decent standard of living needs and how the relevance of the policy component of decent living needs standards towards the fulfillment of worker's welfare.

This research was done by normative juridical method, that is literature studies, so that in the formulation does not require population or sample. The data which used is the secondary data, to obtain secondary data which is any law materials is by literature study. The data was analyzed qualitatively and the presentation of the research was by descriptive method.

The result of this research presents that the role of labour union in the determination of the decent living needs standart which has been stipulated in Law No. 13/2003 and Law No. 21/2000 of Labour Union gives a dominant influence, these is a responsible not only as colective representative but also as a bridge of the labour and employers. There is a relevance in the component of the decent living needs standart policy related to the fulfillment of the prosperity. It is proved by the inclusion of the pricing component of the decent living needs as one of labour prosperity fulfillment intruments.

Keywords: Labour Union, Decent Living Needs, Prosperity